

## ABSTRAK

**Yeni Aryani, SH : “ Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al Syar’iah*)”**, di bawah bimbingan : I. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan II. Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.Hum, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020).

**Kata kunci : Larangan, PNS Wanita, Poligami, HAM, *Maqashid Al-Syariah***

Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika disandingkan dengan *Maqashid Al-Syariah*, ternyata berkaitan dengan *Maqashid Al-Syariah* berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak hubungan antara HAM dan *Maqashid Al-Syariah*. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka *Maqashid Al Syariah* memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan Pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*). Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dikumpulkan menggunakan studi dokumenter. Kemudian dianalisa secara kualitatif dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil penelitian ini mengkaji Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Hak Asasi Manusia maka bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hak pribadi untuk dapat bekerja dan berkarier dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita yang dipoligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari *Maqashid al-syariah*) bahwa telah mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan (*sakinah, mawaddah dan warahmah*), tidak memberikan perlindungan hukum pada perkawinan dan keturunan (*hifz-al nash*) yang terlahir dari perkawinan tersebut serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi wanita PNS dan keturunannya akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.

## ABSTRACT

Yeni Aryani, SH: Prohibition for Polygamy Female Civil Servants (In terms of Human Rights and Maqasid Al Syar'iah), under the guidance of: I. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum and II. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum, at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin (2020).

**Keywords: Prohibition, Female Civil Servants, Polygamy, Human Rights, Maqashid al-Sharia**

Human rights according to Islamic principles are inseparable from the Al-Qur'an and As Sunnah because from these two sources become guidelines and guidance for all mankind. Human rights when compared with maqashid al-sharia, are in fact closely related to Maqashid al-sharia trying to protect one's benefit. Herein lies the relevance between human rights and maqashid al-sharia. When humans are faced with an urgent problem, under pressure and in difficult circumstances, the maqashid al sharia provides an alternative to get out of these difficulties, so that their rights are protected from damage.

This type of research is normative legal research using an analytical approach and a statutory approach. Normative legal research consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The three legal materials were collected using documentary studies. Then it is analyzed qualitatively and the results are concluded specifically.

The results of this study on reviewing Article 45 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 regarding the prohibition of female civil servants who are polygamous to become second / third / fourth wives in terms of human rights, it is contrary to human rights in their personal rights to be able to work and have a career and Article 45 paragraph (2) Government Regulation Number 45 of 1990 regarding the prohibition of female civil servants who are polygamous to become second / third / fourth wives in terms of Maqashid al-sharia) that has resulted in the loss of a woman's right to be able to marry legally, this prohibition is precisely It is a matter of neglect to realize the goals of marriage (sakinah, mawaddah and warahmah), does not provide legal protection for marriage and offspring (hifz-al nash) born from that marriage and causes more adversity for civil servant women and their offspring as a result of a permanent marriage implemented.